



Polarisasi Politik di Indonesia 2014-2019: Sebuah Kajian Pustaka

Ibnu Chaerul Mansyur¹

Abstract

In the 1950s, political life was divided due to sectarian politics. During the New Order and Reform Regime, political polarization had been decreased and managed, but it was strengthened again in 2014, due to the meeting of two political spectrums between pluralist and Islamist groups. This study aims to examine the causes of the strengthening of political polarization between Islamists and pluralists in Indonesia, after it has faded for so long both during the repressive and also the open political system. This research is a qualitative study using literature study method. The results of the study found that political actors pursue their political goals by using polarization strategies, such as mobilizing voters to divide them, spreading hate speech, and exploiting public unrest. The conclusion is that the political polarization that occurred between Islamists and pluralists in Indonesia in 2014-2019 was caused by strategic political actors. This research thus, will contribute to the study of political polarization in Indonesia which however is still limited, especially those which discussing the causes of political polarization.

Keywords

Political Polarization; Islamist; Pluralist

Abstrak

Pada periode 1950-an, kehidupan politik terpecah akibat politik aliran. Orde Baru dan Reformasi sempat menekan dan membuat polarisasi politik mereda, namun polarisasi politik kembali menguat pada tahun 2014, karena bertemunya dua spektrum antara kelompok pluralis dan Islamis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebab menguatnya polarisasi politik antara Islamis dan pluralis di Indonesia, setelah meredup sekian lama dalam sistem politik yang represif maupun terbuka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Hasil penelitian menemukan bahwa aktor politik mengejar tujuan politik mereka dengan menggunakan strategi polarisasi, seperti memobilisasi pemilih hingga terpecah belah, menyebarkan ujaran kebencian, dan mengeksploitasi keresahan masyarakat. Kesimpulannya bahwa polarisasi politik yang terjadi antara Islamis dan pluralis di Indonesia pada 2014-2019 disebabkan oleh strategi aktor politik. Penelitian ini akan menambah kajian polarisasi politik di Indonesia yang masih terbatas, terutama yang membahas penyebab polarisasi politik.

Kata Kunci

Polarisasi Politik; Islamis; Pluralis

¹ Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia, ✉ ibnuchaerul07@gmail.com



Article history

Received 17 April 2023
Revised 17 June 2023
Accepted 20 June 2023
Published 30 June 2023

Cite this article

Mansyur, I. C. (2023). Polarisasi Politik di Indonesia 2014-2019: Sebuah Kajian Pustaka. *Jurnal Politik Profetik*, 11 (1), 1-22.
<https://doi.org/10.24252/profetik.v11i1a1>

Pendahuluan

Terminologi polarisasi dewasa ini kerap dijumpai dalam studi yang menggambarkan kondisi politik di Indonesia (Karim, 2019; Warburton, 2020; Afrimadona, 2021; Jati, 2022). Telah terjadi polarisasi yang sangat kuat sejak Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Fenomena polarisasi tidak hanya terjadi dalam tahapan sebelum Pemilihan Umum (Pemilu), namun juga berlanjut hingga pasca Pemilu (Karim, 2019). Oleh sebab itu, sebagian besar dari studi polarisasi mengaitkan polarisasi politik di Indonesia dengan Pilpres 2014, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, dan Pilpres 2019 (Warburton, 2020; Afrimadona, 2021; Jati, 2022). Tiga Pemilu tersebut memang berkaitan, karena menjadi arena pertarungan antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto, baik secara langsung pada Pilpres 2014 dan 2019, maupun tidak langsung pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Jokowi dan Prabowo adalah kandidat yang memiliki gaya populis. Namun gaya berkampanye kedua kandidat saling bertolak belakang. Jokowi dalam pidatonya lebih sering menggunakan percakapan kehidupan sehari-hari ketimbang membahas gagasan tentang visi Indonesia ke depannya, yang mana hal tersebut populer di kalangan pemilih pedesaan (Aspinall & Mietzner, 2014). Di sisi lain, Prabowo menyampaikan di setiap acara kampanyenya bahwa Indonesia sebagai negara yang hampir runtuh dan Prabowo menawarkan dirinya sebagai penyelamat yang akan membebaskan Indonesia dari korupsi dan eksploitasi asing. Kedua kandidat juga menggarap basis yang berbeda, yakni yang satu mengarak kelompok pluralis-nasionalis, sedangkan yang lainnya menggarap kelompok Islam (Karim, 2019). Adanya perbedaan yang sangat mencolok terkait gaya dan basis akhirnya membuat kutub yang saling berseberangan di antara kedua pendukung. Para pendukung dengan jelas menunjukkan posisi mereka di ruang publik maupun di media sosial.

Polarisasi politik di Indonesia menemukan momentum baru saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sosok yang merupakan afiliasi dari Jokowi, diklaim tidak punya hak untuk memegang jabatan (Aji & Dartanto, 2018) politik di negara mayoritas muslim, karena ia beragama Kristen dan etnis Tionghoa Indonesia. Pesaingnya adalah Anies Baswedan yang terafiliasi dengan Prabowo, yang juga terafiliasi dengan kelompok-kelompok Islam yang menentang Ahok, dan

kelompok-kelompok ini menyebarkan pesan kampanye sektarian melalui jaringan daring, kelompok doa, dan Masjid.

Dalam level masyarakat, studi dari Hamid mendokumentasikan kehidupan masyarakat, terutama setelah Pilkada DKI 2017. Banyak dari mereka yang merasa terpinggirkan dari acara komunitas dan keluarga, karena dukungan mereka untuk Ahok atau Anies (Hamid, 2018). Studinya menemukan adanya warga non muslim yang memutuskan untuk keluar dari grup, karena tetangganya tidak lagi bersedia mengunjungi rumahnya untuk arisan bulanan dan menganggap rumahnya tidak halal. Terdapat juga kasus pertemanan yang terpaksa berakhir akibat temannya menolak untuk berteman dengan seorang pendukung “kafir”.

Pilpres 2019 merupakan arena pertandingan ulang antara Jokowi dan Prabowo. Kehidupan politik di Indonesia masih diwarnai polarisasi politik yang memunculkan rasa benci dan tidak percaya. Studi dari Soderborg dan Muhtadi, yang datanya diambil sesaat sebelum Pilpres 2019, menemukan bahwa kebencian terhadap agama lain dapat terjadi melalui keanggotaan organisasi. Target dari kebencian ini adalah non muslim. Tidak hanya terkait agama, keanggotaan organisasi juga terkait dengan kebencian etnis lainnya, seperti etnis Tionghoa (Aspinall & Mietzner, 2019; Soderborg & Muhtadi, 2021). Di sebuah Sekolah Dasar yang berada di basis Prabowo, orangtua murid tidak setuju jika ada orangtua murid lain yang mendukung Jokowi bergabung di grup *WhatsApp* mereka, bahkan anak-anak juga memahami kesetiaan partisan orangtua mereka. Misalnya, jika ada seorang anak yang orangtuanya mendukung Jokowi, anak tersebut akan mendapatkan perundungan (Warburton, 2020). Dari realitas ini, dapat disimpulkan bahwa anak-anak juga dapat terlibat permusuhan partisan akibat pilihan politik orangtuanya.

Fossati (2019) menyebutkan bahwa saat ini politik di Indonesia mempertemukan dua spektrum antara kelompok pluralis dan Islamis. Ia menggambarkan kelompok pluralis sebagai sekularis yang menyukai pemisahan yang jelas antara Islam dan negara. Meskipun kelompok ini tidak serta-merta menentang nilai-nilai agama yang memainkan peran tertentu dalam kehidupan publik, mereka tidak melihat Islam, atau agama lain, pantas mendapatkan status khusus dalam hubungan negara dan agama. Di sisi lain, kelompok Islamis digambarkan sebagai kelompok yang percaya bahwa Islam harus memiliki posisi istimewa dalam kehidupan publik dibandingkan dengan agama lain.

Beberapa studi politik menjelaskan bahwa polarisasi politik di Indonesia menguat kembali, terutama sejak Pilpres 2014 hingga Pilpres 2019 (Karim, 2019; Warburton, 2020; Afrimadona, 2021; Jati, 2022). Padahal, beberapa studi politik pada periode sebelumnya sudah menganggap bahwa polarisasi politik melemah, karena menurunnya pengaruh ideologi, orientasi keagamaan, dan aliran (Ufen, 2006; Liddle & Mujani, 2007), selain itu juga dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan (Warburton, 2020). Perbedaan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan mengapa polarisasi politik di Indonesia, khususnya antara kelompok Islamis dan pluralis, muncul kembali setelah sekian lama meredup? Padahal, periode Orde Baru, dengan

sistem politik yang represif hingga era reformasi dengan sistem politik terbuka, pada awalnya dapat menekan polarisasi politik di Indonesia.

Polarisasi politik yang kuat pernah terjadi di Indonesia pada periode 1950-an hingga 1960-an, yang diakibatkan oleh politik aliran. Namun, kemudian kembali menurun di rezim Orde Baru. Tumbangnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 membuka ruang politik, yang sebelumnya tertutup akibat pemerintahan yang represif. Terbukanya ruang politik pada era Reformasi pada awalnya tetap menekan polarisasi politik, karena menurunnya pengaruh ideologi, orientasi keagamaan, dan aliran. Namun, polarisasi politik di Indonesia kembali muncul pada tahun 2014 (Karim, 2019; Warburton, 2020; Afrimadona, 2021; Jati, 2022). Menguatnya polarisasi politik antara kelompok Islamis dan pluralis di Indonesia pada periode 2014 hingga 2019 menarik untuk diteliti lebih lanjut. Tahun 2014 adalah awal mula polarisasi politik di Indonesia kembali menguat, sedangkan tahun 2019 menjadi akhir penelitian ini, karena pada tahun tersebut terjadi rekonsiliasi antara elite, ditandai dengan bergabungnya Prabowo ke dalam kabinet Presiden Jokowi. Padahal, sebelumnya kedua aktor ini terlibat kompetisi elektoral yang sangat sengit.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab mengapa polarisasi politik antara kelompok Islamis dan pluralis pada periode 2014-2019 kembali menguat di Indonesia, setelah sekian lama meredup dalam sistem politik yang represif maupun terbuka. Selain itu, studi ini bermaksud menjelaskan penyebab menguatnya polarisasi politik antara kelompok Islamis dan pluralis di Indonesia, serta menambah penelitian terkait polarisasi politik di Indonesia, yang masih dianggap kurang (Karim, 2019), terutama dalam fokus menjelaskan penyebabnya.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik untuk mengonstruksi realitas sosial dan makna kultural (Neuman, 2014). Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi pustaka, yakni dengan mengkaji literatur, seperti jurnal ilmiah atau penelitian yang telah tersedia, dokumen, termasuk pemberitaan media daring maupun luring, serta materi audio dan visual yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Pembahasan

Polarisasi sebagai Konsep

Secara konseptual, para ilmuwan politik memiliki pandangan yang beragam mengenai polarisasi. Polarisasi terbagi dalam dua hal, pertama sebagai keadaan dan kedua sebagai proses. Polarisasi sebagai suatu keadaan mengacu kepada sejauh mana suatu masalah ditentang dalam kaitannya dengan beberapa paradigma, sedangkan polarisasi yang dianggap sebagai proses mengacu kepada peningkatan oposisi dari waktu ke waktu (DiMaggio et al., 1996). Selain itu,

polarisasi menekankan kehadiran simultan dari prinsip, kecenderungan, atau sudut pandang yang berlawanan atau bertentangan (Fiorina & Abrams, 2008), sedangkan polarisasi juga dipandang sebagai peningkatan dukungan untuk pandangan politik ekstrim dibandingkan dengan dukungan untuk pandangan sentris atau moderat (McCarty, 2019). McCoy dan Somer (2019) mendefinisikan polarisasi sebagai proses ketika keragaman atau perbedaan dalam masyarakat semakin selaras dalam satu dimensi, dan orang-orang semakin mempersepsikan, serta menggambarkan politik dan masyarakat dalam istilah "kami" versus "mereka". Istilah "kami" versus "mereka" merupakan suatu keadaan masyarakat yang terpecah dan saling tidak percaya. Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa polarisasi politik merujuk kepada terpecahnya masyarakat akibat adanya perbedaan pilihan politik, yang mana dalam perpecahan ini muncul rasa saling tidak percaya dan kebencian, sehingga memunculkan permusuhan.

Dalam menjelaskan penyebab terjadinya polarisasi, studi oleh Slater dan Arugay berfokus kepada pengelolaan kekuasaan oleh eksekutif sebagai pemicu munculnya polarisasi dan tidak terlalu memperhatikan faktor identitas. Desain demokrasi yang menyediakan pembatasan kekuasaan eksekutif oleh parlemen atau pengadilan akan memicu ketegangan antar institusional, sehingga dapat memicu polarisasi (Slater & Arugay, 2018). McCoy dan Somer kemudian mencoba menjelaskan polarisasi dari sudut yang berbeda. Mereka menganggap bahwa penyebab polarisasi politik bukan berkaitan dengan susunan institusional tertentu, melainkan berkaitan dengan strategi aktor politik, sekaligus tidak mengabaikan adanya faktor perpecahan mendasar dari suatu negara, yang salah satunya adalah perpecahan identitas (McCarty, 2019).

Jika dibandingkan, teori Slater dan Arugay, yang melihat polarisasi politik dari sudut pandang kelembagaan, kurang sesuai diterapkan dalam studi kasus penelitian ini, karena ketegangan antara eksekutif dan parlemen di Indonesia sejak tahun 2014 sangat lemah. Hal ini disebabkan karena parlemen didominasi oleh partai pendukung pemerintah (Slater & Arugay, 2018). Di sisi lain, teori McCoy dan Somer lebih sesuai sebagai alat analisis, karena melihat kondisi Indonesia yang pada periode 2014 hingga 2019 tidak mengalami ketegangan institusional yang signifikan. Selain itu, Indonesia merupakan negara plural, sehingga memiliki perpecahan yang mendasar. Selama beberapa periode, perpecahan tersebut tidak menimbulkan polarisasi yang dalam, sampai akhirnya kini muncul kembali. Penelitian ini menggunakan teori yang dikembangkan oleh McCoy dan Somer dalam menjelaskan penyebab munculnya polarisasi politik (McCoy & Somer, 2019).

Munculnya polarisasi politik tidak selalu disebabkan karena pembelahan sosial, politik yang mendasar, atau susunan institusional tertentu, tetapi muncul ketika aktor politik mengejar tujuan politik mereka dengan menggunakan strategi polarisasi, seperti memobilisasi pemilih dengan memecah belah, menyebarkan ujaran kebencian, dan mengeksploitasi keresahan masyarakat, dan respons oposisi yang menggunakan taktik serupa (McCoy & Somer, 2019). Hasil studi McCoy dan Somer menunjukkan bahwa polarisasi tidak dapat dijelaskan sesederhana adanya

perpecahan sosial yang mendasar. Namun, mereka tidak mengabaikan adanya faktor perpecahan sosial yang mendasar dalam keadaan polarisasi. Menurut mereka, perpecahan sosial dan politik yang mendasar sering hadir, tetapi tidak selalu menjadi dasar polarisasi. McCoy dan Somer kemudian menguji peran perpecahan sosial dan politik dalam polarisasi dengan membedakan antara *salient discursive* dan perpecahan sosial politik yang mendasar. Perpecahan ini mengacu kepada perpecahan lama dan mendalam, yang muncul atau belum dapat diselesaikan, saat reformasi atau pembentukan negara-bangsa yang mereka sebut sebagai “*formative rifts*”. Temuan McCoy dan Somer menunjukkan bahwa polarisasi politik tidak selalu sesuai dengan perpecahan sosial politik atau *formative rifts*. Mereka berpendapat bahwa polarisasi politik terjadi, karena aktor politik berusaha mengeksploitasi keresahan untuk mengaktifkan kebencian berdasarkan perpecahan sosial politik dan *formative rifts* atau merangkai *formative rifts* dengan perpecahan lainnya.

McCoy dan Somer (2019) mengidentifikasi tiga jenis keresahan utama. Pertama adalah keresahan politik atau krisis perwakilan. Keresahan ini timbul akibat adanya kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan merasa tidak terwakili. Kedua adalah keresahan ekonomi. Ekonomi adalah sasaran empuk untuk dieksploitasi oleh aktor politik, karena berkaitan dengan ketimpangan ekonomi yang dapat berfungsi sebagai alat mobilisasi. Ketiga adalah keresahan kultural. Keresahan kultural ini juga berkaitan dengan agama, misalnya perdebatan antara Gereja versus Negara, atau antara pemikiran sekuler dan konservatif di antara penganut agama yang sama. Mereka juga berpendapat bahwa keresahan kultural bisa muncul dari perasaan kehilangan atau adanya ancaman kehilangan status sosial atau ekonomi oleh kelompok dominan dalam masyarakat.

Analisis McCoy dan Somer (2019) juga menjelaskan pola polarisasi. Menurut mereka, polarisasi dimulai ketika para pemimpin politik dan pendukungnya menggambarkan kelompok politik mereka dan kelompok politik lawan dalam istilah “hitam” dan “putih” atau “baik” dan “jahat”. Banyak dari studi kasus mereka melibatkan pemimpin populis yang membungkus populisme dengan narasi polarisasi. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam sebagian besar kasus polarisasi, aktor politik menggolongkan masyarakat sebagai “baik” dan elite sebagai “jahat”, dengan begini para aktor politik dapat mencerna kemapanan atau elite, menyalahkan elite atas penderitaan rakyat, sambil menjunjung tinggi kebajikan “rakyat” yang mereka klaim untuk diwakili.

Ketika kelompok lawan membalas dengan strategi yang serupa, dinamika polarisasi terjadi. McCoy dan Somer (2019) mencontoh kasus di Venezuela, ketika pendukung Hugo Chavez diberi nama *chusmas* (geng) oleh lawan politik mereka, sedangkan pendukung Chavez menggunakan istilah *sifrinos* (slang dari sebuah lagu tentang seorang wanita kaya dan bodoh yang hanya peduli dengan kemewahan) untuk mengacu kepada oposisi kelas menengah dan atas. Penggolongan dan pelabelan kelompok tersebut menimbulkan efek psikologis, bahwa identitas sosial mengerahkan anggota kelompok untuk memegang sentimen positif terhadap

anggota dan sentimen negatif terhadap kelompok lawan. Efek psikologis ini menjadi penting, karena sebagai mekanisme dehumanisasi, depersonalisasi, dan stereotip yang bermuara kepada kebencian emosional, ketakutan, dan rasa saling tidak percaya. McCoy dan Somer berpendapat bahwa politisi yang menggunakan simbol dan bahasa untuk menciptakan identitas “kita” versus “mereka”, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja, akan berkontribusi atas terciptanya mekanisme psikologis ini.

Perdebatan dalam Kondisi Polarisasi Politik 2014-2019 di Indonesia

Pepinsky (2019) memetakan kelompok yang berdebat menjadi dua, yaitu Islamis dan non-Islamis, yang memiliki kategori luas, mencakup muslim taat yang setuju dengan konstitusi multi agama di Indonesia, muslim yang memiliki orientasi politik yang liberal atau pluralis, dan nasionalis sekuler yang menganggap agama adalah urusan pribadi. Di sisi lain, Fossati (2019) menyebutkan bahwa politik di Indonesia mempertemukan dua spektrum antara kelompok pluralis dan Islamis. Secara umum, pluralis dapat didefinisikan sebagai persetujuan bahwa tidak ada satu agama pun yang dapat menjadi satu-satunya sumber kebenaran dan bahwa negara harus mengakui serta mengakomodasi keragaman keyakinan.

Dalam konteks Indonesia, pluralis dikaitkan dengan kebhinekaan (keberagaman) yang mengacu kepada semboyan negara Bhineka Tunggal Ika dan netralitas agama Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang dianggap inti karakter Indonesia. Islamis mengacu kepada kelompok dan tokoh yang berupaya membawa hukum dan prinsip Islam secara formal ke ranah publik, yang dalam praktiknya mengejar berbagai macam agenda, termasuk mengadvokasi negara Islam, menuntut syariah dijadikan landasan hukum, dan membela hak-hak muslim serta kemuliaan Islam (Fealy, 2020). Beberapa ilmuwan politik lainnya juga menggunakan terminologi pluralis dan Islamis (Aspinall & Mietzner, 2014; Muhtadi & Muslim, 2021). Kelompok yang digolongkan sebagai kelompok pluralis telah mengalami transformasi, jika dibandingkan pada tahun 1950-an (Fealy, 2020).

Kelompok pluralis menggunakan istilah “Islamis” untuk merujuk kepada kelompok yang berada di ujung spektrum yang lebih konservatif dan doktriner, yang kelompok pluralis anggap akan berusaha mengislamkan negara dan mengikis keharmonisan dan kepercayaan masyarakat melalui eksklusivitas agama. Fealy (2020) mengategorikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan kelompok salafi puritan yang merepresentasikan varian Islam Arab yang bertentangan dengan budaya Islam lokal yang seperti dipraktikkan oleh NU dalam kelompok Islamis, sedangkan Pepinsky (2019) memasukan Front Pembela Islam (FPI) dalam kelompok Islamis.

Dalam konteks penerimaan Pancasila, secara mendasar HTI menerima Pancasila sebagai gagasan filosofi dan memuat Perjuangan penegakan syariah dalam sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa (Arif, 2016), sedangkan FPI, lebih memilih konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersyariah dibanding negara Islam atau sistem khalifah. Selain itu, FPI juga mengakui Pancasila sebagai

ideologi negara dan sila pertama sebagai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, namun mereka menganggap perlunya penerapan syariah bagi mayoritas umat Islam di Indonesia (Nubowo, 2021). Kelompok pluralis, yang dari awal telah menerima Pancasila sebagai dasar negara, menafsirkan sila pertama sebagai kebebasan masyarakat Indonesia untuk menyembah Tuhan dengan cara yang leluasa, dan setiap rakyat hendaknya bertuhan secara berkebudayaan dengan tidak ada egoisme agama, serta hendaknya negara Indonesia menjadi negara bertuhan (Republik Merdeka, 2018).

Pada Pilpres 2014, kedua spektrum tersebut memiliki afiliasi politik berbeda. Prabowo Subianto didukung oleh partai konservatif Islam, sedangkan Jokowi mewakili aliran pluralis (Warburton, 2020). Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menjadi poros utama pendukung Jokowi, sedangkan Prabowo didukung oleh beberapa partai Islam dan elite Islamis serta organisasi masyarakat sipil, terutama kelompok Islam “garis keras” seperti FPI (Pepinsky, 2019).

Perdebatan antara kelompok Islamis dan pluralis dapat dilihat dari tuntutan mereka. Misalnya, ketika FPI menyampaikan dukungan ke Prabowo pada tahun 2014 melalui partai Islam pendukungnya, kelompok ini menyuarkan permintaan, jika Prabowo terpilih menjadi Presiden, FPI meminta Calon Presiden (Capres) yang berkomitmen membasmi kemaksiatan, serta mewujudkan pemerintahan Islam di semua tingkat. Mereka juga meminta tidak adanya penolakan Peraturan Daerah (Perda) syariah yang dibuat oleh pemerintah daerah, dan ada pula permintaan penerapan asas proporsional dalam pemilihan kepala daerah serta pejabat publik, karena mereka menganggap banyak wilayah dengan mayoritas umat Islam, tetapi dipimpin oleh non muslim (Merdeka.com, 2014a). Permintaan ini bertolak belakang dengan kelompok pluralis yang menginginkan penghapusan Perda syariah dan akan melarang munculnya Perda baru yang berlandaskan syariat Islam. Perda syariah dikhawatirkan akan menciptakan dikotomi tatanan sosial dalam masyarakat dan dianggap akan mengganggu kemajemukan NKRI yang berlandaskan Bhineka Tunggal Ika (Republika, 2014).

Pertentangan selanjutnya adalah terkait pemimpin non muslim. Posisi Gubernur DKI Jakarta, setelah Jokowi terpilih menjadi Presiden, digantikan oleh wakilnya, yakni Ahok, yang beragama Kristen dan etnis Tionghoa. Duduknya Ahok di kursi Gubernur DKI Jakarta mendapat penolakan dari kelompok Islamis, terutama FPI. Setidaknya ada tiga alasan mereka menolak Ahok sebagai Gubernur. Pertama, Ahok bukan seorang muslim; Kedua, perilakunya dianggap arogan, dan; Ketiga, penolakan umat Islam Jakarta terhadap kepemimpinan Ahok (Merdeka.com, 2014b). Adapun kelompok pluralis mendukung Ahok, karena dianggap pelantikannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perdebatan mengenai pemimpin non muslim memuncak pada tahun 2016 hingga 2017 di Jakarta. Penolakan besar-besaran kelompok Islamis terhadap Ahok semakin menguat pasca peristiwa “Al-Maidah ayat 51”. Pemuka agama muslim, cendekiawan, dan aktivis muslim membentuk gerakan penolakan Ahok (Aspinall &

Mietzner, 2019). Mobilisasi kelompok Islamis secara besar-besaran terjadi. Mobilisasi ini berupa protes yang bertujuan untuk mendorong agenda Islamis, yaitu pemecatan dari jabatan Gubernur Tionghoa-Kristen, yang tidak hanya melalui Pemilu, namun juga melalui tuntutan pidana dengan tuduhan penistaan agama. Pada waktu bersamaan, koalisi Islamis mendukung kandidat beragama muslim untuk memenangkan Pemilu (Mietzner et al., 2018). Terjadi serangkaian unjuk rasa yang diberi nama “Aksi Bela Islam” yang melibatkan berbagai organisasi masyarakat berbasis Islam seperti FPI, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), dan lainnya.

Penggunaan sentimen agama sangat marak dalam Pilkada DKI Jakarta. Terdapat ajakan untuk memilih gubernur muslim, penggunaan diksi “pemimpin kafir”, bahkan beberapa Masjid menolak mensholatkan pendukung Ahok, karena dianggap muslim “munafik” (Bagir, 2017). Di sisi lain, kelompok pluralis yang mendukung Ahok berkomitmen untuk membuat Jakarta harus mengedepankan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI, serta menentang keras menjadikan Jakarta bersyariah (Investor.id, 2017). Anggota kabinet Ryamizard Ryacudu selaku Menteri Pertahanan juga berkomentar terkait polemik penggunaan agama di Pilkada DKI Jakarta, dengan mengatakan bahwa jangan mencampurkan agama dengan politik (Kompas.com, 2016).

Hasil dari Pilkada DKI Jakarta mengecewakan untuk kelompok pluralis, karena Ahok mengalami kekalahan dan harus masuk penjara dengan tuduhan penistaan agama. Hal ini menjadi alarm untuk kelompok pluralis yang sedang berkuasa. Presiden Jokowi dan pemerintahannya mengambil dua langkah untuk merespons hal tersebut. Pertama, Jokowi mengambil langkah yang semakin otoriter. Misalnya, membubarkan HTI pada tahun 2017 dengan mengarahkan tuduhan HTI tidak sejalan dengan Pancasila dan gagasan NKRI. Kedua, Jokowi memperkuat kredibilitas Islam dengan bantuan para pemimpin Nahdlatul Ulama (NU) untuk mempromosikan “Islam Nusantara”, yang dianggap lebih moderat yang dinilai lebih cocok untuk kultur Indonesia (Aspinall & Mietzner, 2019).

Pada tahun 2018, terdapat gerakan yang dimulai dari media sosial dengan *tagline* #2019GantiPresiden. Gerakan #2019GantiPresiden juga memasukkan unsur Islamis 212 (Power, 2020). NU yang berada pada spektrum yang berbeda merespons hal ini dengan melakukan mobilisasi Barisan Ansor Serbaguna (Banser). Banser mencoba melakukan gangguan dalam acara #2019GantiPresiden di Surabaya, sehingga menyebabkan pertikaian antara Ansor dan Laskar FPI (Nuraniyah, 2020). Eskalasi semakin meningkat ketika pada bulan Oktober, kelompok Islamis melakukan infiltrasi pada Hari Santri Nasional dan mengibarkan bendera Tauhid yang diasosiasikan dengan HTI. Di Garut, anggota Banser menyita dan membakar bendera hitam tersebut, sehingga menimbulkan kegaduhan besar-besaran di media sosial, karena dalam bendera tersebut tertulis nama Tuhan (Nuraniyah, 2020). Atas peristiwa ini, terjadi mobilisasi kelompok Islamis di Jakarta dengan mengusung tema “Aksi Bela Tauhid”. Menariknya, di tengah demonstrasi, seorang orator menyerukan “2019 Ganti Presiden”, karena menganggap Jokowi

telah banyak melakukan kebohongan, mengkriminalisasi ulama, dan dinilai anti-Islam (BBC.com, 2018).

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perdebatan yang menonjol dalam polarisasi politik di Indonesia adalah antara kelompok pluralis dan Islamis. Hal ini juga dijelaskan oleh Aspinall dan Mietzner (2019), bahwa periode 2014 hingga 2019 perpecahan sosial lama yang memisahkan kelompok pluralis dan Islamis telah aktif kembali. Perdebatan yang menonjol dalam kondisi polarisasi di Indonesia adalah terkait peran agama dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Saya sepakat dengan klaim Fossati yang menyatakan bahwa kelompok Islamis menginginkan adanya posisi istimewa dalam kehidupan sosial politik, jika dibandingkan dengan agama lainnya, sedangkan kelompok pluralis tidak serta-merta menolak adanya peran agama dalam kehidupan publik tertentu. Namun, kelompok pluralis menginginkan adanya pemisahan antara Islam dan negara, mereka tidak melihat Islam, atau agama lain, pantas mendapatkan pengistimewaan dalam hubungan negara dan agama (Fossati, 2019).

Pemimpin Populis

Fenomena polarisasi tidak hanya terjadi dalam tahapan sebelum Pemilu, namun juga berlanjut hingga pasca Pemilu (Karim, 2019). Oleh sebab itu, sebagian besar dari studi polarisasi mengaitkan polarisasi politik di Indonesia dengan Pilpres 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017, dan Pilpres 2019 (Warburton, 2020; Afrimadona, 2021; Jati, 2022). Tiga Pemilu tersebut memang berkaitan, karena menjadi arena pertarungan antara Jokowi dan Prabowo Subianto, baik secara langsung pada Pilpres 2014 dan 2019 maupun tidak langsung pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Margiansyah (2019) menganggap bahwa Pilpres 2014 adalah titik balik menguatnya populisme dalam kehidupan politik Indonesia dengan munculnya dua figur, yaitu Jokowi dan Prabowo. Kebangkitan populisme di Indonesia didorong kekecewaan terhadap elite politik, institusi yang tidak efektif, dan patronase (Tomsa, 2018).

Pertarungan politik pada periode 2014 hingga 2019 menjadi pertarungan antara dua tokoh, yaitu Jokowi dan Prabowo. Kedua kandidat ini memiliki gaya yang populis (Aspinall & Mietzner, 2014). Namun Jokowi dan Prabowo memiliki gaya populisme yang berbeda, Jokowi bersifat pragmatis, moderat, dan inklusif (Mietzner, 2014), sedangkan Prabowo dianggap lebih bersifat populis klasik (Aspinall & Mietzner, 2014).

Jokowi berlatar belakang seorang pengusaha furnitur di Kota Surakarta, karir politik Jokowi dimulai dari level daerah. Sebelum menjadi Presiden, ia menduduki jabatan Walikota Kota Surakarta dari tahun 2005 hingga 2012 dan kemudian terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012, yang membuat namanya semakin menarik perhatian nasional dan pada akhirnya ia dicalonkan sebagai Calon Presiden oleh partainya PDI Perjuangan.

Nilai jual utama dari Jokowi adalah gayanya yang sederhana. Hal ini bertolak belakang dengan gaya hidup glamor yang dipertontonkan oleh beberapa pejabat negara. Persona kesederhanaan Jokowi ditampilkan melalui cara bicara dengan

logat Jawa, makan di warung pinggir jalan, menggunakan penerbangan kelas ekonomi, dan tidak sungkan untuk berinteraksi hangat dengan masyarakat (Aspinall & Mietzner, 2014). Jokowi juga menggunakan pakaian yang murah dan berbicara dengan santai, tampilan Jokowi terlihat seperti rata-rata orang Indonesia kelas menengah ke bawah, yang membuatnya tampak seperti antitesis dari tipikal politisi elit Indonesia (Mietzner, 2014). Ciri khas yang paling melekat dalam diri Jokowi adalah kebiasaannya melakukan kunjungan langsung ke masyarakat secara tiba-tiba untuk berinteraksi langsung, bercanda, dan mendengarkan keluhan serta harapan masyarakat, kegiatan ini diistilahkan dengan *blusukan* (Aspinall & Mietzner, 2014).

Mietzner menganggap Jokowi adalah seorang populis pragmatis, moderat, dan inklusif. Jokowi berbeda dengan tokoh populis klasik, Jokowi tidak mengutuk pembusukan negara dan masyarakat, tidak mencoba memainkan miskin melawan kaya, menolak eksklusifitas Islam, Jokowi tidak mempropagandakan penghancuran rezim lama. Sebaliknya, dia mengusulkan perbaikan teknokratis pada status quo demokrasi, dan juga menghindari retorika anti asing. Ketika ditanya oleh Prabowo dalam acara debat tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia terkait kontrak dengan perusahaan tambang yang merugikan negara, Jokowi menjawab bahwa kontrak tersebut memiliki legalitas dan Indonesia harus menghargainya hingga berakhir, perbaikan kontrak dapat dilakukan saat negosiasi ulang. Jawaban tersebut dianggap sebagai jawaban yang moderat dan pragmatis. Selain itu, Jokowi juga mampu memobilisasi akar rumput tanpa menggunakan cara-cara khas populisme klasik, dengan mengedepankan gaya hidupnya yang sederhana dan citra lamanya selaku rakyat biasa, serta menjanjikan berbagai kebaikan dalam program-program kesehatan dan pendidikan nasional yang merujuk kepada keberhasilannya sebagai walikota dan gubernur. Namun, dengan persona tersebut, Jokowi membuat masyarakat miskin pedesaan di Indonesia secara alami merasa tertarik padanya (Mietzner, 2014).

Prabowo memiliki latar belakang yang berbeda dari Jokowi. Jika Jokowi seorang yang tidak memiliki menggarisi keturunan politisi yang kuat, Prabowo adalah seorang yang datang dari keluarga politisi terkemuka. Prabowo memiliki latar belakang priyayi Jawa, memiliki nenek moyang yang berperan dalam “Perang Jawa” melawan Belanda (1825-1830), kakeknya seorang Margono Djojohadikoesoemo pendiri Bank Negara Indonesia (BNI), ayahnya seorang Sumitro Djojohadikoesoemo, salah satu ekonom terbaik Indonesia (Aspinall, 2015). Prabowo sendiri memiliki latar belakang militer Angkatan Darat dan pernah menduduki jabatan sebagai Komandan Pasukan Khusus.

Terdapat tiga komponen utama dari program politik Prabowo, yaitu nasionalisme ekonomi, mengecam elit penguasa yang korup di Indonesia, dan *authoritarian* (Aspinall, 2015). Daya tarik politik Prabowo dinilai lebih populis klasik dibandingkan Jokowi. Dalam beberapa pidato kampanye, Prabowo membawakan tema utama Indonesia telah dieksploitasi oleh orang asing yang menyedot kekayaan alam negara, yang menyebabkan pemiskinan rakyat (Aspinall & Mietzner,

2014). Prabowo menganggap sumber daya negara dijual dengan harga murah kepada orang asing, sehingga ia berjanji untuk melindungi kekayaan negara dan memulihkan harga diri bangsa (Mietzner, 2014). Selain itu, Prabowo juga sering berkomentar, bahwa Indonesia telah menjadi bangsa kacung dalam pidato-pidatonya (Aspinall, 2015). Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan “untuk apa kita merdeka kalau disuruh menjadi kacung bangsa lain” (GerindraTV, 2014).

Dalam beberapa kesempatan, Prabowo juga mengecam para elit yang dianggap korup. Dalam sebuah pidatonya pada Hari Buruh, Prabowo mengatakan:

“Saya sudah keliling Kabupaten, di mana-mana rakyat sudah tidak tahan lagi, sudah banyak korupsi di Republik Indonesia ini. Semua dikorupsi, semua mau disogok, semua pemimpin kita mau dibeli dan disogok. Akhirnya, tidak ada keadilan ekonomi dan politik bagi bangsa Indonesia... kita tidak bisa terlalu banyak berharap kepada elite kita. Mereka pintar bicara, saking pintarnya meraka pintar bohongi semua.” (GerindraTV, 2014)

“Saya masuk politik terpaksa, minta ampun politik ini. Dari lima belas orang yang saya ketemu di politik, empat belas bohong semua.” (GerindraTV, 2014)

Prabowo menggunakan elemen kunci dari populisme klasik dengan mengonstruksikan musuh rakyat dengan elite yang ditampilkan sebagai musuh bebuyutannya juga, menggambarkan komplotan asing adalah lawan, dan elite korup yang tidak hanya memiskinkan rakyat tetapi juga berusaha menghancurkan bangsa (Aspinall, 2015). Prabowo menganggap dirinya seorang “demokrat”. Ia beralasan bahwa pada tahun 1998, ia memiliki kapasitas untuk mengukudeta pemerintahan Habibie. Namun, faktanya dia tidak melakukannya, sehingga itu menjadi semacam kredensial atas komitmennya terhadap demokrasi. Namun, komitmen Prabowo terhadap demokrasi masih dipertanyakan. Prabowo pernah mengeluhkan tentang sistem politik yang terlalu liberal, selain itu beberapa minggu sebelum Pilpres, Prabowo mengecam keras praktik demokrasi dengan mengkritik pemilihan langsung yang dianggap sebagai produk asing dan tidak sesuai diterapkan di Indonesia (Aspinall, 2015).

Pesan-pesan yang disampaikan oleh Prabowo disampaikan melalui pidato yang berapi-api. Prabowo mengembangkan gaya demagogis yang membedakannya dengan politisi lainnya. Ia juga menyukai kampanye publik secara besar-besaran, berbicara dengan suara menggelegar, memanggil hadirin sebagai saudara, dan menggunakan pertanyaan retorik, serta berpakaian seperti Soekarno dengan pecinya, dan bahkan menggunakan mikrofon dengan konsep retro (Aspinall, 2015).

Pada periode 2014 hingga 2019, Prabowo menjalin aliansi dengan populisme Islam. Kelompok yang menonjol dalam populisme Islam berkaitan dengan kelompok Islamis. Populisme Islam melibatkan partai politik hingga organisasi masyarakat berbasis keagamaan. Hadiz (2018) memasukkan Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) dalam kategori populisme Islam. Adapula sarjana politik yang

mengkategorikan FPI sebagai populisme Islam (Mietzner, 2020; van Bruinessen, 2021). Tokoh yang menonjol dalam populisme Islam adalah Rizieq Shihab. Seorang keturunan Arab-Indonesia sekaligus tokoh yang mempelopori pendirian FPI.

Dapat dilihat bahwa polarisasi politik di Indonesia melibatkan pemimpin politik yang populis. McCoy dan Somer (2019) menjelaskan pola polarisasi. Pertama dimulai dengan adanya konflik antar elite politik untuk memperebutkan kekuasaan dengan memobilisasi pemilih untuk meningkatkan nilai elektoral mereka. Kedua, elite politik menggunakan narasi populisme atau klaim untuk mewakili suatu kelompok. Dalam konteks Indonesia, telah dijelaskan di atas bahwa pemimpin politik di Indonesia menggunakan populisme untuk memobilisasi dukungan.

Lebih lanjut, McCoy dan Somer (2019) berpendapat bahwa polarisasi bersifat politis dan relasional. Oleh karena itu, reaksi antara petahana dan oposisi sangat mempengaruhi dinamika polarisasi. Aliansi Prabowo dengan Populisme Islam mampu memobilisasi umat untuk melakukan demonstrasi dan menciptakan dikotomi “baik” dan “jahat” atau “umat bermoral” dan “rezim zalim”. Untuk merespons hal tersebut, Jokowi menggunakan tindakan koersi dengan melakukan kriminalisasi terhadap beberapa tokoh oposisi. Selain itu, muncul dikotomi baru, yaitu “pancasilais” dan “anti-kebhinekaan”. Dengan begitu, dinamika polarisasi politik di Indonesia kembali menguat.

Penggolongan dan Pelabelan Kelompok

Polarisasi dimulai ketika para pemimpin politik dan pendukungnya menggambarkan kelompok politik mereka dan kelompok politik lawan dalam istilah “hitam” dan “putih” atau “baik” dan “jahat”. Dalam kasus Indonesia, ditemukan pula penggolongan dan pelabelan kelompok. Pendukung Jokowi dan Prabowo sama-sama melakukan penggolongan dan pelabelan satu sama lainnya. Jokowi dianggap oleh beberapa kelompok Islam pendukung Prabowo sebagai pemimpin yang tidak memiliki ketaatan Islam yang kuat dan mempunyai rencana untuk mengimplementasikan kebijakan yang kontra kelompok Muslim, sedangkan Prabowo dianggap oleh beberapa kelompok pendukung Jokowi adalah calon yang didukung oleh kelompok ekstrimis agama dan memiliki keinginan untuk mengubah Indonesia menjadi negara Islam atau kekhalifahan (Masykuri & Ramadhan, 2021). Selama periode 2014 hingga 2019, pelabelan antar kelompok kerap terjadi. Masykuri dan Ramadhan mengidentifikasi beberapa pelabelan yang kerap muncul melalui wacana dan stigma di antara kelompok.

Tabel 1. Label dan Pengertian Antar Kelompok

Label	Pengertian
Muslim Munafik	Label ini merujuk pada pengertian bahwa seorang muslim, baik sebagai kelompok maupun individu, yang memilih pemimpin di luar agama Islam dianggap sebagai muslim munafik.
Partai Setan vs Partai Allah	Label “partai setan” ditujukan pada partai yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan Islam, sedangkan “partai Allah” ialah partai yang mewakili kepentingan kelompok Islam.
Islam Marah dan Islam Ramah	Pengertian “Islam marah” merujuk pada ekspresi keagamaan yang menampilkan arogansi dan disertai dengan tindak “kekerasaan” saat menyampaikan ajaran Islam. Sedangkan “Islam ramah” justru sebaliknya, cara atau ekspresi keagamaan yang dilingkupi dengan pesan Islam yang menjunjung perdamaian dan kemanusiaan.
Umat Sumbu Pendek dan Panjang	Label “sumbu pendek” merupakan label lama yang mengkritik ekspresi kelompok Islam yang dinilai terlalu cepat marah, tanpa pertimbangan yang dalam. Sebaliknya “sumbu panjang” mengekspresikan kelompok Islam yang lebih moderat dan toleran.
Ulama yang jadi “cebong”	Label ini memberikan pengertian bahwa ada tokoh atau pemuka agama Islam yang sebelumnya berada dalam barisan pendukung Prabowo kemudian beralih posisi mendukung Jokowi.
Kadrin (Kadal Gurun)	Label ini muncul dalam percakapan media sosial – yang biasanya dilakukan oleh buzzer. Dalam pengertian terbatas, label Kadrin ditujukan kepada kelompok atau individu yang tidak mendukung kebijakan Jokowi-Ma’ruf Amin atau anti-pemerintah sekaligus merujuk pada preferensi ideologi keagamaan dengan hadirnya isu khilafah dan radikalisme.

Sumber: Masykuri & Ramadhan, 2021.

Untuk melengkapi tabel di atas, saya mencoba memetakan pelabelan antar kelompok di Indonesia berdasarkan pelabelan yang telah dijelaskan dalam Tabel 1. Saya mencoba membagi kelompok tersebut ke dalam pluralis dan Islamis.

Tabel 2. Pemetaan Pelabelan Kelompok

Pluralis	Islamis
Muslim Munafik	-
Partai Setan	Partai Allah
Islam Ramah	Islam Marah
Umat Sumbu Panjang	Umat Sumbu Pendek
Cebong	Kadrun

Sumber: Data penulis, 2023.

Berdasarkan tabel 1 dan 2, dapat dilihat bahwa masing-masing kelompok mencoba melabeli kelompok politik lawan sebagai yang “jahat” dan kelompok diri sendiri dianggap “baik”. Misalnya, penggunaan label “Muslim Munafik” merujuk kepada penganut Islam yang memilih pemimpin di luar agama Islam, terminologi “munafik” mengandung konotasi yang buruk. Dengan dilabelinya istilah tersebut kepada seseorang atau kelompok, maka mengindikasikan adanya kelompok yang menganggap dirinya “tidak munafik”.

Jika McCoy dan Somer mencontohkan pelabelan di Venezuela, maka di Indonesia yang paling sering ditemui adalah pelabelan “cebong” dan “kampret atau kadrun”. “Cebong” adalah sebutan bagi pendukung Jokowi, sedangkan “kadrun” merupakan sebutan yang merujuk pada pihak yang kontra Jokowi. Terdapat anggapan bahwa istilah “cebong” yang diidentikan ke pendukung Jokowi terinspirasi dikarenakan kegemaran Jokowi memelihara kodok. Oleh sebab itu, Rizieq Shihab, salah satu tokoh yang kontra terhadap Jokowi, sempat menyebut Jokowi dengan sebutan “Jokodok” (BBC News Indonesia, 2018). Istilah “kadrun” memiliki arti yang cukup luas, selain digunakan untuk melabeli pihak yang kontra Jokowi, juga digunakan untuk melabeli kelompok yang dianggap memiliki preferensi keagamaan yang kuat, karena label ini mencerminkan stereotip buruk terhadap kelompok atau individu yang dianggap ke-Arab-arab-an, serta kadang kala disematkan kepada pihak yang kritis terhadap pemerintah dan dianggap dari bagian kelompok 212 (Masykuri & Ramadhan, 2021).

Pelabelan ini menimbulkan kebencian emosional dan saling tidak percaya. Kebencian emosional ini dapat dilihat adanya penolakan untuk menyalatkan karena dianggap “Muslim Munafik”. Muncul pula rasa takut, misalnya kelompok Islamis takut jika Jokowi menang akan memarjinalkan umat Muslim, sedangkan pendukung pluralis takut jika Prabowo menang akan membuat Indonesia sebagai negara Islam. Selain itu, kedua kelompok ini tidak percaya satu sama lain, kelompok pluralis menganggap bahwa kelompok Islamis didukung oleh kelompok radikal,

sedangkan kelompok Islamis menganggap bahwa kelompok pluralis didukung oleh kaum komunis.

Terdapat dua isu terkait pelabelan antar kelompok di Indonesia. Pertama, pelabelan ini berhubungan dengan konteks kausalitas dan tujuan atau konsekuensi dari label menjadi penanda dalam membentuk preferensi dan sikap politik, serta memberi petunjuk siapa kawan dan lawan. Kedua, pelabelan kelompok merupakan segregasi dan polarisasi politik di Indonesia pada 2014-2019. Melalui pelabelan ini, sentimen agama dan perbedaan antar kelompok menjadi instrumen untuk melakukan mobilisasi atau menggerus dukungan politik lawan dalam kontestasi elektoral (Masykuri & Ramadlan, 2021).

Pelabelan kelompok yang terjadi di Indonesia menunjukkan prasangka dan bias terhadap pihak kubu lawan, karena terdapat semacam efek psikologis yang membuat anggota kelompok memiliki sentimen positif terhadap sesama anggota kelompoknya, dan memiliki sentimen negatif terhadap kelompok lawan. Serta terjadi juga seperti yang disampaikan oleh McCoy dan Somer, bahwa efek psikologis tersebut sebagai mekanisme dehumanisasi, depersonalisasi, dan stereotip yang bermuara pada kebencian emosional, ketakutan, dan rasa saling tidak percaya (McCoy & Somer, 2019).

Ujaran Kebencian

Instrumen selanjutnya yang digunakan oleh aktor politik adalah dengan menggunakan ujaran kebencian. Pada bagian sebelumnya, dijelaskan bahwa telah terjadi pelabelan antar kelompok di Indonesia. Sepanjang periode 2014-2019, muncul juga narasi-narasi yang menjelekkan antar kelompok di Indonesia, terutama dalam isu-isu identitas, seperti yang telah dijelaskan bahwa persaingan antara pluralis dan Islamis termanifestasi antara persaingan Jokowi dan Prabowo. Kedua pendukung tokoh tersebut mengeluarkan narasi-narasi kebencian satu sama lain, terutama di media sosial.

Tabel 3. Kapitalisasi Isu-isu dalam Perdebatan Dunia Maya antar Pendukung

Jokowi	Prabowo
Jemaah Monaslimin	Bela Islam
Jokowi Keturunan PKI	Prabowo Natalan
Tenaga Kerja Asing dari Cina	Ancaman NKRI Bersyariah
Anti Islam	Capres Hasil Ijtima Ulama
Islam Liberal	Islam Radikal
Pelindung PKI	Pendukung khilafah/ISIS
Legalisasi LGBT, pengakuan agama Yahudi	Perda Berbasis Agama
Larang Adzan	Larang Tahlilan

Sumber: Puskapol UI, 2019.

Menurut catatan Puskapol UI, kedua kelompok ini sama-sama mengaku sebagai korban dari ujaran kebencian ini. Puskapol UI mencatat, kubu Jokowi menuding Prabowo menggunakan kebohongan dalam kampanye untuk mempengaruhi serta menggunakan politik ketakutan dalam kampanye, sedangkan pendukung Prabowo menuding Jokowi melakukan *playing victim* terhadap isu identitas. Kubu Prabowo menganggap pihak Jokowi yang melakukan politik identitas, dengan manuver memilih wakil dari kalangan ulama dan melakukan tuduhan hoaks, serta mengaburkan fakta-fakta terkait kegagalan pemerintahan Jokowi. Namun, hasil riset dari Puskapol UI menunjukkan bahwa kedua kubu jelas mengapitalisasi penggunaan sentimen identitas, terutama isu agama untuk meraih suara pemilih, menyerang kubu lawan, membingkai isu, ataupun menggiring opini publik (Puskapol UI, 2019).

Penggunaan ujaran-ujaran kebencian, terutama isu agama, tidak jarang ditangkap secara mentah oleh masyarakat. Misalnya, studi dari Sirait (2019) menemukan bahwa ujaran kebencian terhadap Jokowi, terutama pada isu “anti-Islam”, memberikan efek kepada masyarakat. Mereka yang percaya bahwa Jokowi anti-Islam sangat tidak mau memilih Jokowi dan mengalihkan dukungan mereka kepada Prabowo. Studi dari Soderborg dan Muhtadi (2021) lebih lanjut menjelaskan adanya relasi antara kebencian dan dukungan politik. Mereka menemukan kebencian agama sangat terkait dengan organisasi tertentu, terutama organisasi yang berperan dalam mobilisasi isu agama.

Eksplotasi Keresahan Masyarakat

Polarisasi politik dapat terjadi, karena aktor politik berusaha untuk mengeksploitasi keresahan untuk mengaktifkan kebencian. Penelitian ini menemukan adanya eksploitasi keresahan masyarakat oleh aktor politik berdasarkan perpecahan sosial dan politik. Prabowo dan pendukungnya berusaha mengeksploitasi keresahan kelompok Islamis. Kelompok ini merasa bahwa sistem sosial, ekonomi, dan politik didominasi oleh prinsip sekularisme dan kapitalisme, atau dalam arti telah didominasi oleh Barat (Hadiz, 2018). Sistem yang selama ini berjalan dianggap menghasilkan ketidakadilan sosial, terutama di sektor ekonomi, sehingga diperlukan sebuah sistem alternatif, yaitu berlandaskan Islam.

Dalam konteks Indonesia, tatanan sosial yang ada saat ini masih dianggap belum mampu mewujudkan keadilan sosial. Dominasi etnis tertentu atas perekonomian dan pengaruh asing yang dianggap berlebihan, dianggap sebagai tanda ketidakadilan semakin tajam (Hadiz, 2018). Hadiz lebih lanjut menjelaskan bahwa yang menjadi korban dalam narasi tersebut adalah umat yang terpinggirkan sejak zaman kolonial. Kelompok Islamis cenderung terpinggirkan secara ekonomi dan politik (Muhtadi & Halida, 2021). Keresahan tersebut berusaha dieksploitasi oleh Prabowo dan pendukungnya. Prabowo dianggap dalam kampanyenya menyalahkan masalah ekonomi Indonesia kepada etnis minoritas tertentu, serta bersama pendukungnya menyebarkan retorika anti-Barat dan anti-komunis. Hal ini membantunya mendapatkan dukungan dari kelompok Islamis (Bourchier, 2019).

Di sisi lain, terdapat keresahan kelompok pluralis bahwa Indonesia lebih Islami. Bourchier (2019) mengatakan bahwa setelah kejatuhan Soeharto, Indonesia menjadi lebih demokratis namun sekaligus menjadi lebih Islamis dalam kehidupan publik atau privat. Masyarakat lebih taat dalam praktek keagamaan, dengan mengekspresikan identitas Muslim, mulai dari penggunaan hijab hingga bank syariah. Dalam sisi politik, Bourchier (dalam Fealy & White, 2008) menganggap bahwa pemerintah Yudhoyono mengintegrasikan kelompok Islam konservatif ke dalam kekuasaannya. Kompromi politik Yudhoyono terhadap kelompok Islam dapat dilihat melalui dukungannya atau kurangnya tindakan terhadap berbagai organisasi dan lembaga yang aktivitasnya jelas telah merampas hak-hak minoritas di Indonesia (Bush, 2015).

Kubu Jokowi mencoba memanfaatkan keresahan kelompok pluralis atas meningkatnya Islamisme. Jokowi dan pendukungnya merespons hal tersebut dengan hipernasionalisme yang ditandai kembalinya diskursus Pancasila (Hadiz, 2017). Hadiz menyatakan bahwa Jokowi melakukan pendekatan dengan mempromosikan simbol-simbol budaya yang terkait dengan nasionalisme Indonesia, semisal memprakarsai 1 Juni sebagai hari libur nasional dalam rangka Hari Pancasila, dan menekankan kesucian Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar negara persatuan dalam pidatonya. Sebagai Presiden, Jokowi juga membubarkan beberapa organisasi masyarakat yang dianggap sebagai anti-Pancasila.

Kesimpulan

Polarisasi politik bukan sebuah fenomena yang baru di Indonesia. Pada periode 1950-an, polarisasi politik di Indonesia menguat diakibatkan politik aliran. Namun, polarisasi politik menurun di bawah pemerintahan represif dan sentralistis pada era Orde Baru. Polarisasi politik pada era Reformasi, yang membuka keran politik di Indonesia, pada awalnya dapat ditekan, karena adanya fenomena yang oleh ilmuwan politik disebut “dealiranisasi”. Hingga pada tahun 2014, beberapa kajian politik menggambarkan polarisasi politik di Indonesia kembali menguat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab polarisasi antara kelompok Islamis dan pluralis di Indonesia pada tahun 2014-2019 disebabkan oleh strategi aktor politik. Kedua aktor politik yang sedang bertarung dikategorikan oleh beberapa ilmuwan politik sebagai tokoh populis. Selain itu, terdapat upaya pecah belah masyarakat, dengan melakukan pelabelan antar kelompok, adanya penggunaan ujaran kebencian, dan masing-masing aktor mencoba mengeksploitasi keresahan masyarakat.

Masih terdapat banyak ruang untuk pendalaman studi mengenai polarisasi politik di Indonesia. Penelitian berikutnya diharapkan mampu mengeksplorasi dampak polarisasi politik terhadap demokrasi di Indonesia, serta mengkaji studi polarisasi politik di tingkat politik lokal.

Pernyataan Keaslian

Penulis menyatakan bahwa artikel adalah karya asli penulis dan bebas dari plagiarisme, serta telah mencantumkan seluruh referensi di dalam artikel. Artikel ini belum pernah dipublikasikan dan tidak sedang dikirim ke jurnal lain.

Biografi

Ibnu Chaerul Mansyur merupakan mahasiswa Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Referensi

- Afrimadona. (2021). Revisiting Political Polarisation in Indonesia: A Case Study of Jakarta's Electorate. *Journal of Current Asian Affairs* 40(2):1–25.
- Aji, N., & Dartanto, T. (2018). Behind Jokowi's Victory: Did Economic Voting Matter in the 2014 Indonesian Presidential Election? *Asia Pasific Journal Regional Science* 2(1):115–38.
- Aspinall, E. (2015). Oligarchic Populism: Prabowo Subianto's Challenge to Indonesian Democracy. *Indonesia* 99:1–28.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2014). Indonesian Politics in 2014: Democracy's Close Call. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 50(3):347–69.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Southeast Asia's Troubling Elections: Nondemocratic Pluralism in Indonesia. *Journal of Democracy* 30(4):104–18.
- Bagir, Z. A. (2017). Islam Dan Demokrasi Indonesia Setelah Pilkada DKI. *The Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada*. Retrieved December 2, 2022 (<https://crs.ugm.ac.id/islam-dan-demokrasi-indonesia-setelah-pilkada-dki/>).
- BBC News Indonesia. (2018). Dari Bani Daster Sampai IQ 200 Sekolam, 'kamus Nyinyir' Berbagai Istilah Di Medsos Yang Diperbarui. *BBC News Indonesia*. Retrieved December 2, 2022 (<https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-42814349>).
- BBC.com. (2018). Aksi 'Bela Tauhid' Di Jakarta Dengan Teriakan 'Ganti Presiden.' *Bbc.Com*. Retrieved December 2, 2022 (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45990053>).
- Bourchier, D. M. (2019). Two Decades of Ideological Contestation in Indonesia: From Democratic Cosmopolitanism to Religious Nationalism. *Journal of Contemporary Asia* 49(5):713–33.
- van Bruinessen, M. (2021). Traditionalist Muslims and Populism in Indonesia and Turkey. *Jurnal Tashwirul Afkar* 40(02).
- Bush, R. (2015). Religious Politics and Minority Rights during the Yudhoyono Presidency. In E. Aspinall, M. Mietzner, & D. Tomsa. in *The Yudhoyono*

- Presidency : Indonesia's Decade of Stability and Stagnation*. Singapore: ISEAS Publishing.
- DiMaggio, P., Evans, J., & Bryson, B. (1996). Have American's Social Attitudes Become More Polarized? *American Journal of Sociology* 102(3):690–755.
- Fealy, G. (2020). Jokowi in the Covid-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and the Overbearing State. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 56(3):301–23.
- Fealy, G., & White, S. (2008). *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Fiorina, M. P., & Abrams, S. J. (2008). Political Polarization in the American Public. *Annual Review of Political Science* 11:563–88.
- Fossati, D. (2019). The Resurgence of Ideology in Indonesia: Political Islam, Aliran and Political Behaviour. *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 38(2):119–48.
- Hadiz, V. R. (2017). Indonesia's Year of Democratic Setbacks: Towards a New Phase of Deepening Illiberalism? *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 53(3):261–78.
- Hadiz, V. R. (2018). *Populisme Islam Di Indonesia Dan Timur Tengah*. Depok: LP3ES.
- Hamid, S. (2018). *Normalising Intolerance: Elections, Religion and Everyday Life in Indonesia*. Melbourne: Centre for Indonesian Law, Islam and Society.
- Investor.id. (2017). Basuki-Djarot Berkomitmen Jadikan Jakarta Pancasila. *Investor.Id*. Retrieved December 2, 2022 (<https://investor.id/archive/basuki-djarot-berkomitmen-jadikan-jakarta-pancasilais>).
- Jati, W. R. (2022). Polarization of Indonesian Society during 2014-2020: Causes and Its Impacts toward Democracy. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 26(2).
- Karim, A. G. (2019). Mengelola Polarisasi Politik Dalam Sirkulasi Kekuasaan Di Indonesia: Catatan Bagi Agenda Riset. *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 10(2):215–28.
- Kompas.com. (2016). Di Depan Ulama, Ryamizard Sebut Agama Dan Politik Jangan Dicampuradukkan. *Kompas.Com*. Retrieved December 2, 2022 (<https://nasional.kompas.com/read/2016/11/11/13173651/di.depan.ulama.ryamizard.sebut.agama.dan.politik.jangan.dicampuradukkan>).
- Liddle, R. W., & Mujani, S. (2007). Leadership, Party, and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia. *Comparative Political Studies* 40(7):832–57.
- Margiansyah, D. (2019). Populisme Di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme Dan Konsekuensinya Dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik* 16(1):47.
- Masykuri, R., & Ramadlan, M. F. S. (2021). Analisis Manifestasi Segregasi Politik Pelabelan Dan Polarisasi Di Antara Kelompok Islam Sepanjang 2014-2019. *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 12(1):68–87.
- McCarty, N. (2019). *Polarization: What Everyone Needs to Know*. Oxford: Oxford University Press.

- McCoy, J., & Somer, M. (2019). Toward a Theory of Pernicious Polarization and How It Harms Democracies: Comparative Evidence and Possible Remedies. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 681(1):234–71.
- Merdeka.com. (2014a). 6 Permintaan FPI Jika Prabowo Jadi Presiden. *Merdeka.Com*. Retrieved December 2, 2022 (<https://www.merdeka.com/politik/6-permintaan-fpi-jika-prabowo-jadi-presiden.html>).
- Merdeka.com. (2014b). FPI Tolak Ahok Jadi Gubernur Karena Bukan Islam & Bacotnya Busuk. *Merdeka.Com*. Retrieved December 2, 2022 (<https://www.merdeka.com/peristiwa/fpi-tolak-ahok-jadi-gubernur-karena-bukan-islam-bacotnya-busuk.html>).
- Mietzner, M. (2014). Indonesia's 2014 Elections How Jokowi Won and Democracy Survived. *Journal of Democracy* 25(4).
- Mietzner, M., Muhtadi, B., & Halida, R. (2018). Entrepreneurs of Grievance Drivers and Effects of Indonesia's Islamist Mobilization. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 174:159–87.
- Muhtadi, B., & Halida, R. (2021). Muslim Identity and Deprivation. In L. C. Sebastian, S. Hasyim, & A. R. Arifianto. Pp. 14–39 in *Rising Islamic Conservatism in Indonesia*. New York: Routledge.
- Muhtadi, B., & Muslim, K. (2021). Islamic Populism and Voting Trends in Indonesia. *ISEAS Perspective*.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Seventh Edition. Essex: Pearson Education Limited.
- Nubowo, A. (2021). Indonesian Hybrid Salafism: Wahdah Islamiyah's Rise, Ideology and Utopia. In C. L. Sebastian, S. Hasyim, & A. R. Arifianto. Pp. 181–97 in *Rising Islamic Conservatism in Indonesia*. New York.
- Nuraniyah, N. (2020). Divided Muslims: Militant Pluralism, Polarisation and Democratic Backsliding. In T. P. Power, & E. Warburton. Pp. 81–100 in *Democracy in Indonesia From Stagnation to Regression?* Singapore: ISEAS Publishing.
- Pepinsky, T. (2019). Islam and Indonesia's 2019 Presidential Election. *Asia Policy* 14(4):54–62.
- Power, T. P. (2020). Assailing Accountability: Law Enforcement Politicisation, Partisan Coercion and Executive Aggrandisement under the Jokowi Administration. In T. P. Power, & E. Warburton. Pp. 277–302 in *Democracy in Indonesia From Stagnation to Regression?* Singapore: ISEAS Publishing.
- Puskapol UI. (2019). *Mengelola Politik Identitas Dalam Pemilu 2019*. Depok: Puskapol UI.
- Republik Merdeka. (2018). Makna Sila Pertama Pancasila Versi Bung Karno. *Rmol.Id*. Retrieved March 23, 2023 (<https://politik.rmol.id/read/2018/01/10/321775/makna-sila-pertama-pancasila-versi-bung-karno>).

- Republika. (2014). Penghapusan Perda Syariah Usulan Jokowi-JK Bertentangan Dengan Adat Minang. *Republika.Com*. Retrieved (<https://republika.co.id/berita/n6ulik/penghapusan-perda>).
- Sirait, F. E. T. (2019). Ujaran Kebencian, Hoax Dan Perilaku Memilih (Studi Kasus Pada Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia). *Jurnal Penelitian Politik* 16(2):179–90.
- Slater, D., & Arugay, A. A. (2018). Polarizing Figures: Executive Power and Institutional Conflict in Asian Democracies. *American Behavioral Scientist* 62(1):92–106.
- Soderborg, S., & Muhtadi, B. (2021). Resentment and Polarization in Indonesia.
- Tomsa, D. (2018). Parties And Party Politics in The Post-Reformasi Era. in *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia*. New York: Routledge.
- Ufen, A. (2006). *Political Parties in Post-Suharto Indonesia: Between Politik Aliran and 'Philippinisation.'* GIGA Working Papers.
- Warburton, E. (2020). *How Polarised Is Indonesia and Why Does It Matter? In Democracy in Indonesia From Stagnation to Regression?* Singapore: ISEAS Publishing.